

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI SINABANG**

TRIWULAN I 2026

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI SINABANG**


Disahkan di Sinabang
Pada Hari Rabu, 01 April 2026

KETUA
PENGADILAN NEGERI SINABANG



RISWANDY, S.H., M.H.

Ketua Tim Survei,



ANTON NURSALEH SIREGAR, S.H.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	2
1.2.Maksud dan tujuan	2
1.3.Landasan Hukum	2
1.4.Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1.Metode Penelitian	4
2.2.Populasi dan Sample	4
2.3.Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Tehnik Pengumpulan data dan Quality Control	5
2.5.Tehnik Anailisi dan Data	5
2.6.Tahapan Pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil Responden	8
3.2.Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan	20
3.4. Persepsi Responden terhadap kualitas Pelayanan satuan kerja Pengadailan Negeri Sinabang	23
3.5. Tindak Lanjut Hasil Survei Persepsi Korupsi Terendah	23
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1.Kesimpulan	25
4.2.Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. **Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. **Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu triwulan (tiga bulan) atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

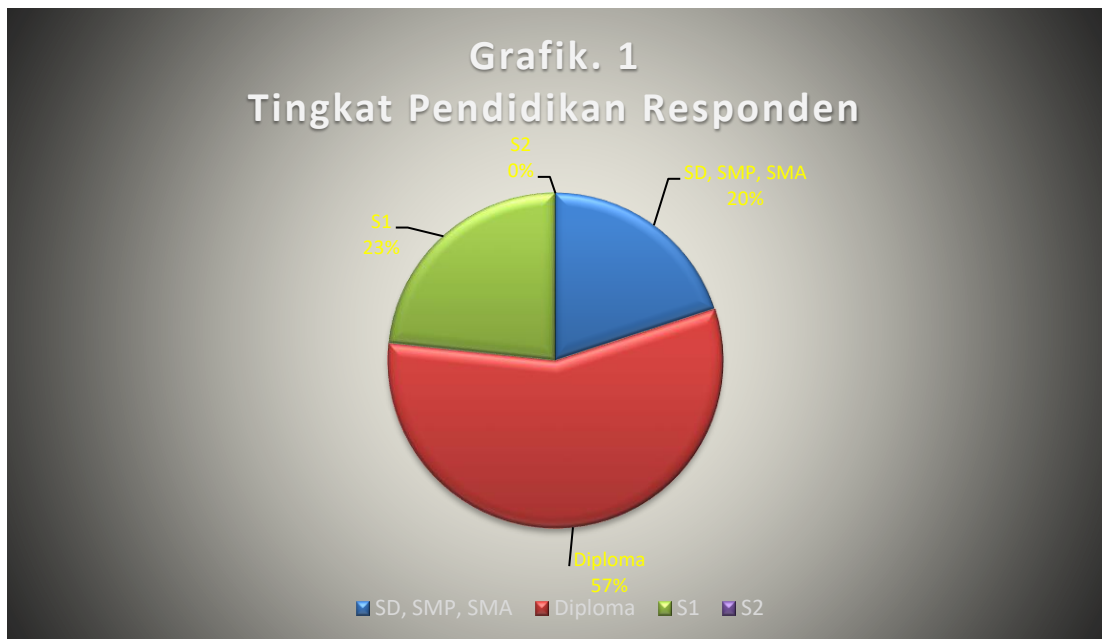
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sinabang, mayoritas memiliki latar Pendidikan S1 sebesar : 23 % ;

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD, SMP, SLTA	6	20
2	Diploma	17	57
3	S1	7	23
4	S2	0	0
Jumlah		30	100

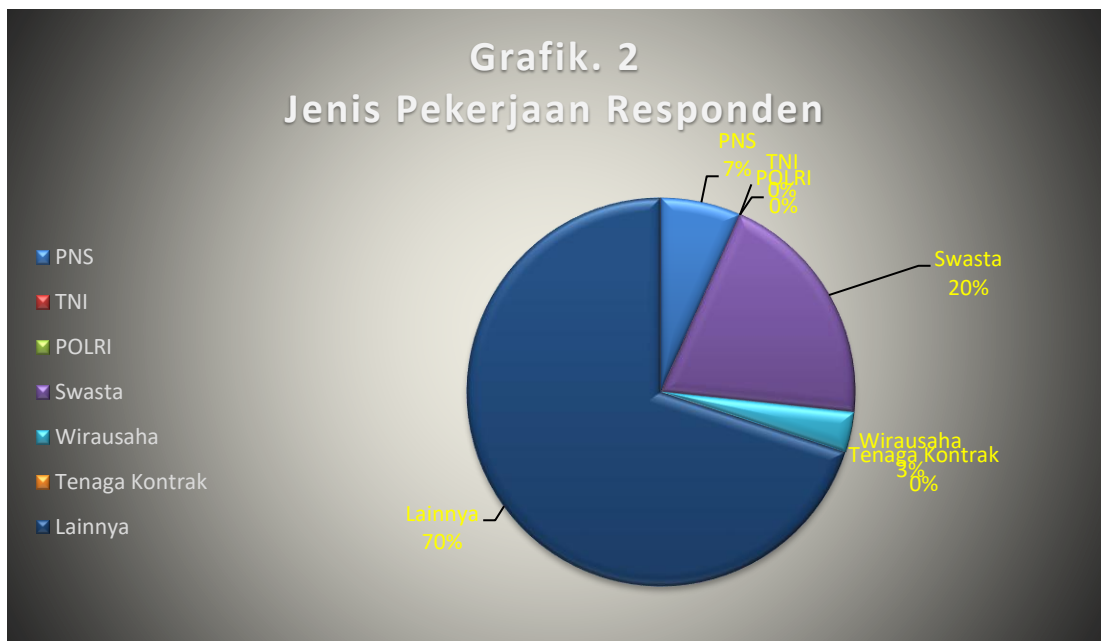


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 3.33% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Sinabang memiliki pekerjaan sebagai Wirausaha.

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	2	6.67
2	TNI	0	0.0
3	POLRI	0	0.0
4	Swasta	6	20.0
5	Wirausaha	1	3.33
6	Tenaga kontrak	0	0.0
7	Lainnya	21	70.0
Jumlah		30	100.0



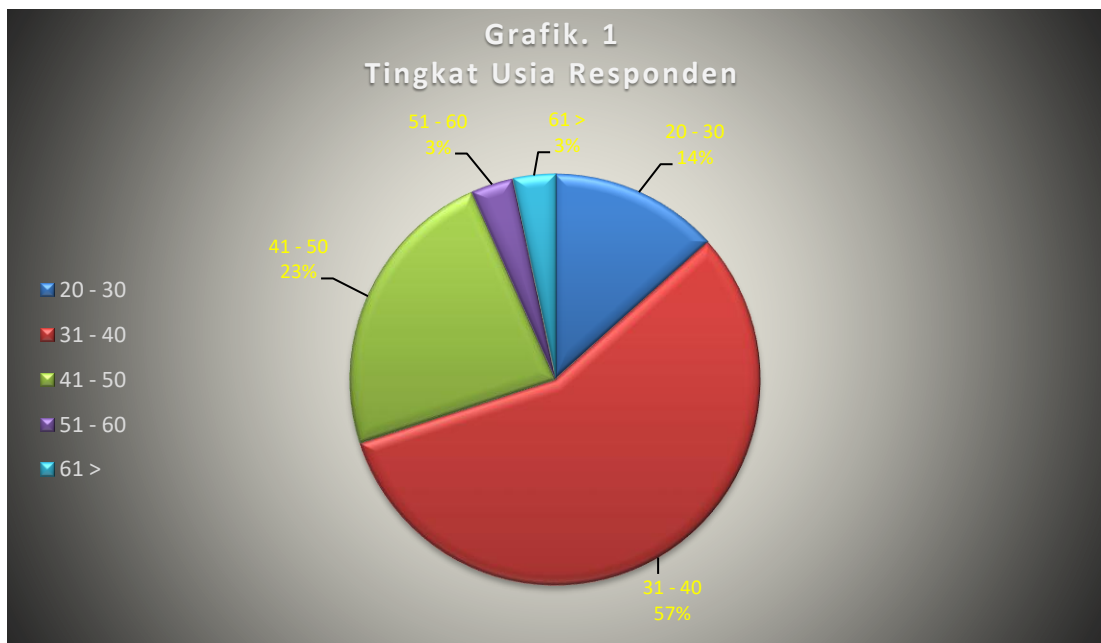
3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam

kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 31 s/d 40 tahun sebesar 56.67 % .

Tabel 6.
Tingkat Usia responden
 Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	20-30	4	13.00
2	31-40	17	56.67
3	41-50	7	23.33
4	51-60	1	3.33
5	61>	1	3.33
Jumlah		30	100



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

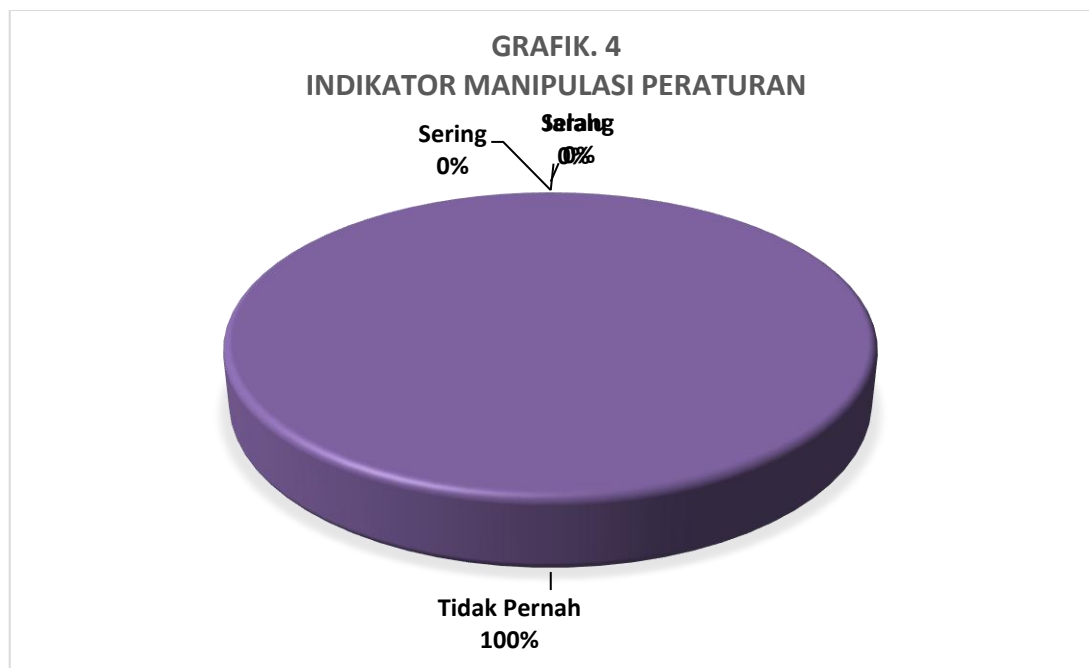
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.”

Tabel 7.

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	30	100
2.	Jarang	3	0	0.0
3.	Sering	2	0	0.0
4.	Selalu	1	0	0.0
Jumlah			30	100



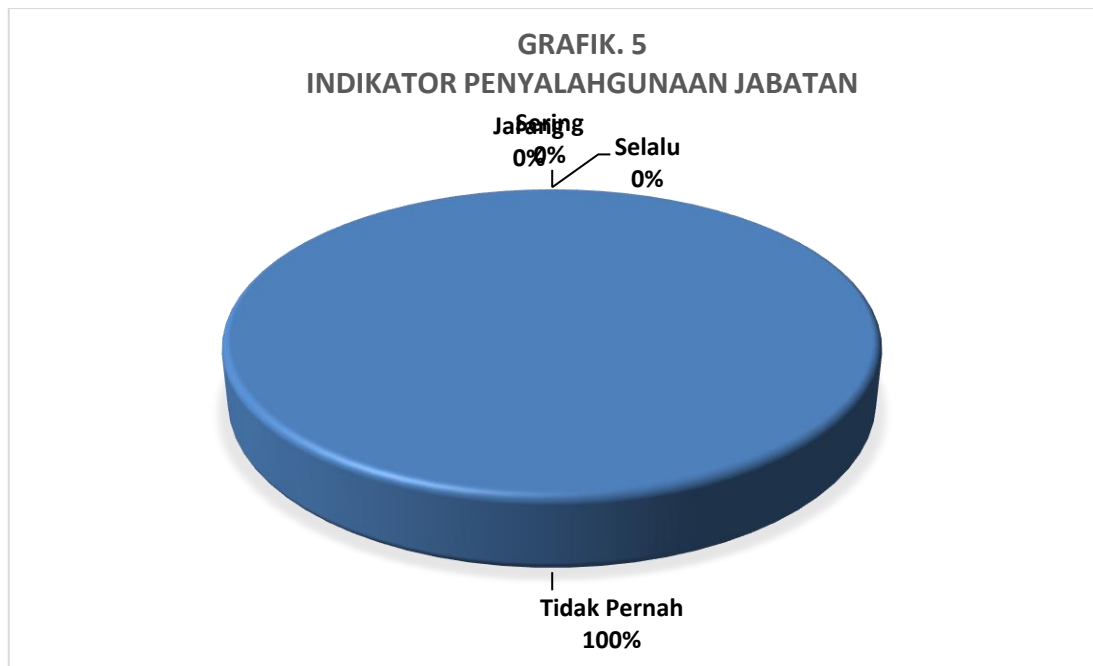
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang bersih dari Korupsi

Tabel 8.

Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	30	100.0
2.	Jarang	3	0	0.0
3.	Sering	2	0	0.0
4.	Selalu	1	0	0.0
Jumlah			30	100

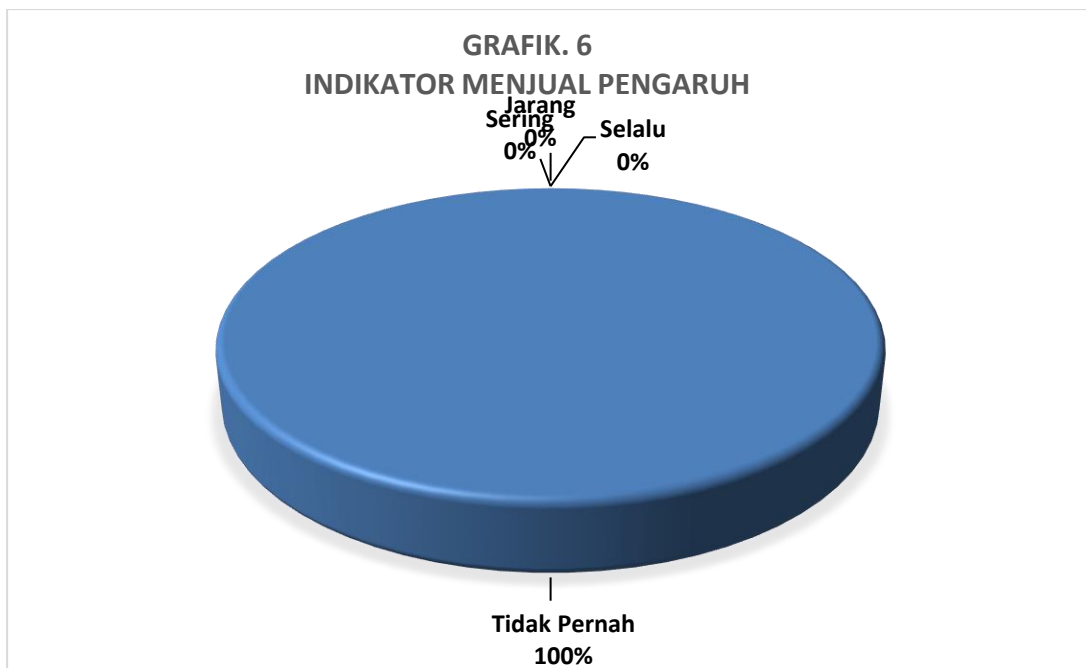


3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi”.

Tabel 9.
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	30	100.0
2.	Jarang	3	0	0.0
3.	Sering	2	0	0.0
4.	Selalu	1	0	0.0
Jumlah			30	100.0



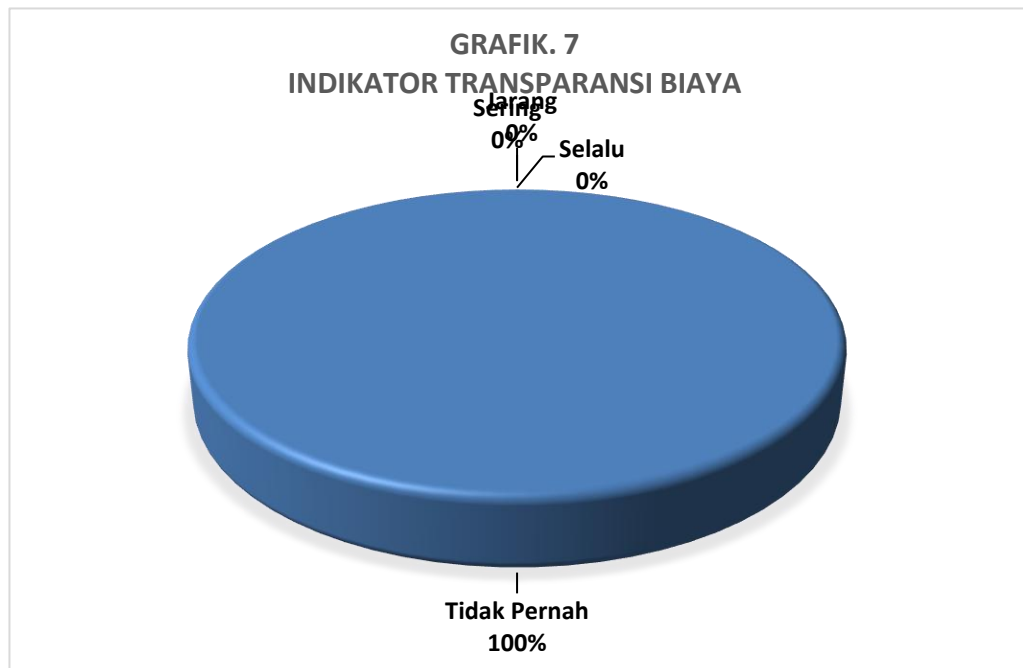
3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	30	100.0
2.	Sering	3	0	0.0
3.	Jarang	2	0	0.0
4.	Tidak Pernah	1	0	0.0
Jumlah			30	100

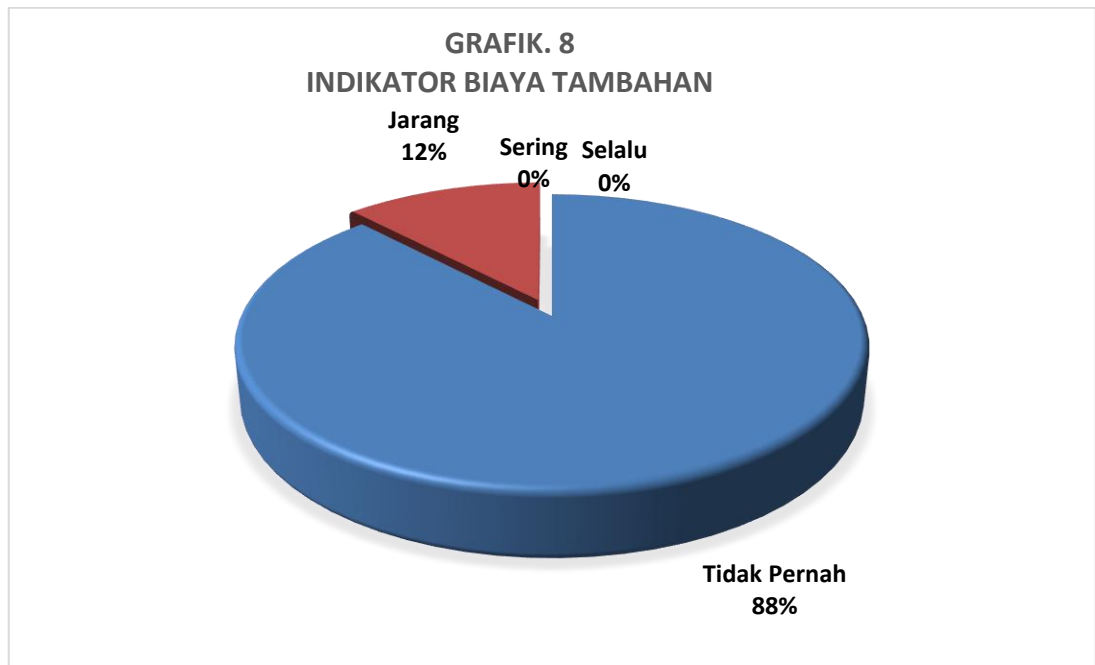


3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.

Tabel 11.
indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	30	100.0
2.	Jarang	3	0	0.0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			30	100



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.”

Tabel 12.
Indeks pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	30	100.0
2.	Jarang	3	0	0.0
3.	Sering	2	0	0.0
4.	Selalu	1	0	0.0
Jumlah			30	100



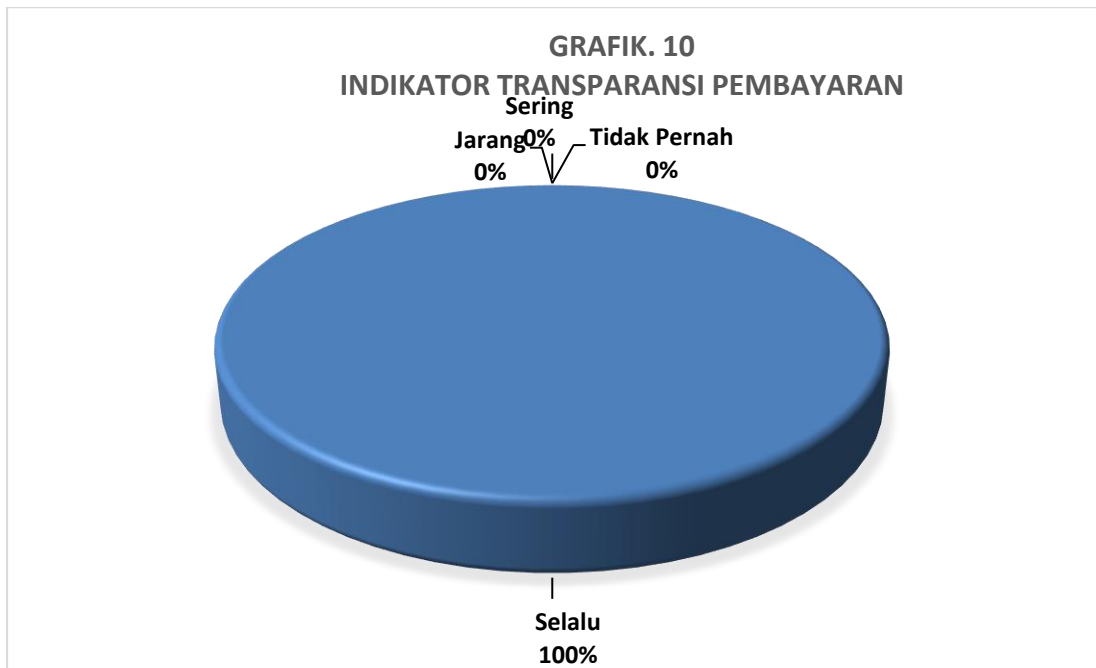
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.’

Tabel 13.

Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	30	100.0
2.	Sering	3	0	0.0
3.	Jarang	2	0	0.0
4.	Tidak Pernah	1	0	0.0
Jumlah			30	100



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responde pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang bersih dari Korupsi.

Tabel 14.
Indeks pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	30	100.0
2.	Jarang	3	0	0.0
3.	Sering	2	0	0.0
4.	Selalu	1	0	0.0
Jumlah			30	100.0



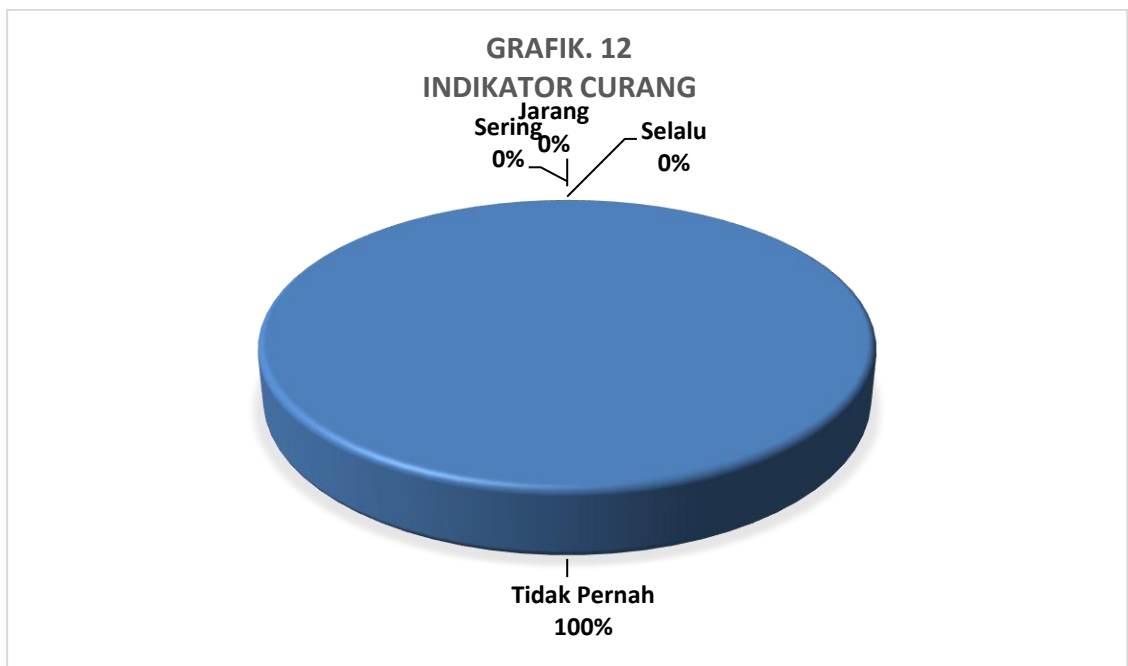
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.”

Tabel 15.

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	30	100.0
2.	Jarang	3	0	0.0
3.	Sering	2	0	0.0
4.	Selalu	1	0	0.0
Jumlah			30	100.0



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

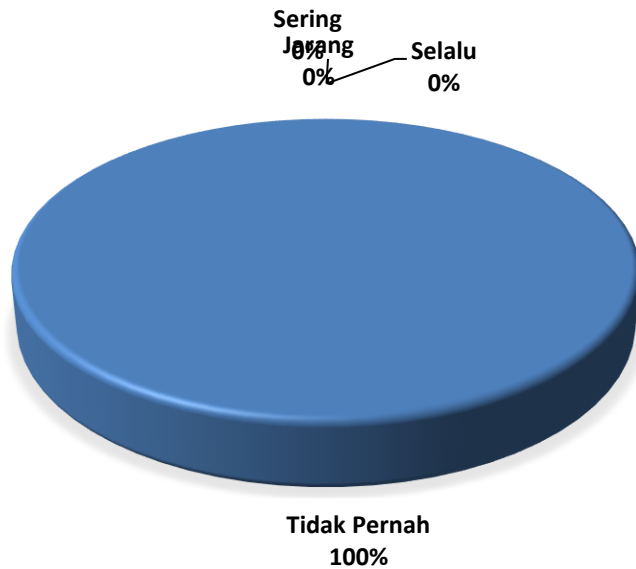
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang bersih dari Korupsi.

Tabel 16.

Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	30	100.0
2.	Jarang	3	0	0.0
3.	Sering	2	0	0.0
4.	Selalu	1	0	0.0
Jumlah			30	100

GRAFIK. 13
INDIKATOR TRANSAKSI RAHASIA



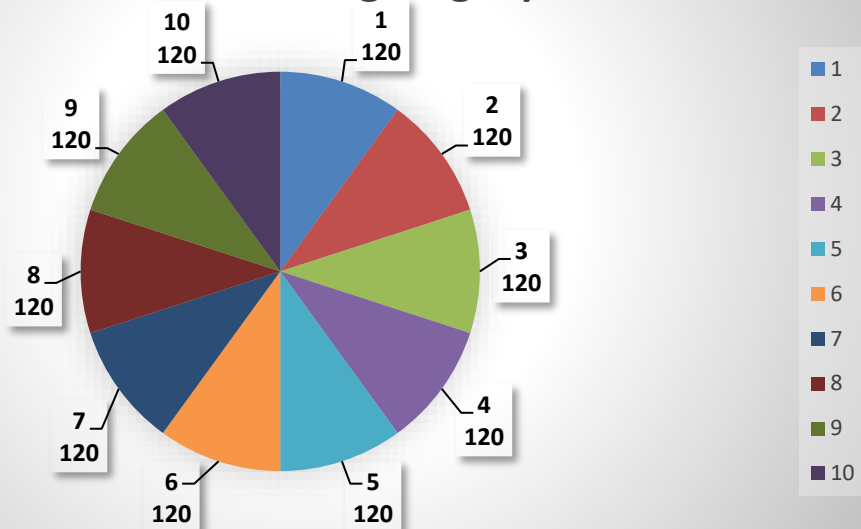
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sinabang sebesar 100 %.

Tabel 17.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Sinabang

No Responden	NILAI UNSUR PENILAIAN										Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Rata-Rata	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	40,000
NRR tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	4,000 *)
IPK Unit Pelayanan											4,00 **)

Grafik. 14
Unsur / Ruang Lingkup



Indeks 100 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan “**BERSIH DARI KORUPSI**”. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Sinabang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang. Ada pun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

- **“Pengadilan Negeri Sinabang bebas korupsi..”**
- **“semoga pembiayaan pengurusan layanan gratis”**
- **“Petugas melayani secara ikhlas dan tanpa meminta tips”**
- **“Tetap amanah dalam menjalani pekerjaan”**
- **“Semoga semakin ditingkatkan lagi kinerjanya dan semakin jaya”**

3.5. Tindak Lanjut Hasil Survei Persepsi Korupsi Terendah

Berdasarkan hasil survei persepsi korupsi yang dilakukan, terdapat hasil survei 3 (tiga) terendah. Antara lain :

1. Indikator Manipulasi Peraturan dengan nilai 4,00;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan dengan nilai 4,00;
3. Indikator Menjual Pengaruh dengan nilai 4,00 ;

Tindak lanjut dari ketiga unsur yang bernilai rendah diatas telah dilakukan dengan cara :

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Manipulasi Peraturan telah ditinjau lanjuti dengan cara meningkatkan Kerjasama dan harus bersemangat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara professional dan berintegritas.

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan Jabatan telah ditindaklanjuti dengan cara Meawjibkan petugas untuk memakai tanda pengenal dan

memasang banner pengaduan untuk mengantisipasi apabila terdapat pelanggaran penyalahgunaan jabatan.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Indikator Menjual Pengaruh telah ditindaklanjuti dengan cara meningkatkan pengawasan internal, melarang petugas bertemu langsung tanpa agenda resmi, dan memasang media informasi anti suap.

PENGADILAN NEGERI SINABANG
 Jalan. Tgk Di Ujung No. 406 Sinabang Kab. Simelue
 Telpun : (0650) 21042-21043 Fax : (0650) 21403
 Website : www.pn-sinabang.go.id
 Email : pnsinabang@yahoo.co.id

**Jenis-Jenis Biaya PNBP Meja PTSP
 Bagian HUKUM**

1. Biaya PNBP Surat Tidak Pernah Terpidana 5(Lima) Tahun Atau Lebih.	Rp. 10.000,-
2. Biaya PNBP Surat Kuasa, Khusus, Insidentil dan Substitusi.	Rp. 10.000,-
3. Biaya PNBP Salinan Putusan (Penetapan).	Rp. 10.000,-
4. Biaya Foto Copy Salinan Putusan / Penetapan.	Rp. 500,-



NO.	KELOMPOK	NO.	DESA	RUANG	BIAYA	LOKASI	STATUS
SIMELUE TIMUR							
1	1	1	1	1	1	1	1
SALANG							
ALAPAN							
SIMELUE BARAT							
TELUK TENGAH							
SIMELUE UTARA							
TELUK SELATAN							
SIMELUE UTARA							
TELUK DALAM							

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Sinabang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Sinabang memiliki Indeks Persepsi Korupsi 100% atau masuk pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI”

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.0;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.0;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.0;
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.0;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.0;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.0;
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4.0;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.0;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.0;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.0;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sinabang Triwulan I Tahun 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.70 atau masuk pada persepsi “Bersih Dari Korupsi”. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Perbuatan Curang memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

KUESIONER :

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		JAWABAN
(1)		(2)
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Selalu sesuai prosedur b. Sering sesuai prosedur c. Jarang sesuai prosedur d. Tidak sesuai prosedur
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	a. Petugas melayani tanpa meminta imbalan b. Petugas melayani jarang meminta imbalan c. Petugas melayani sering meminta imbalan d. Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu

➤ Berikan kritik dan saran serta masukan saudara/i agar Pengadilan Negeri Sinabang dapat jadi lebih baik.

.....

.....

.....